



KLIPING

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Sumber Berita: kaltara.prokal.co

TANGGAL:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
																	✓													

BULAN:

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
						✓					

TAHUN

2016

HALAMAN

-

Benahi Catatan BPK RI, Bupati Bulungan Bertekad Raih WTP

TANJUNG SELOR - Hasil pemeriksaan keuangan daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI beberapa waktu lalu, di mana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan meraih penilaian opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Meraih opini yang sama dalam dua tahun belakangan ini, Bupati Bulungan H.Sudjati bertekad untuk dapat meraih opini Wajar Tanpa Penecualian (WTP), sebagaimana yang diperoleh oleh Provinsi Kaltara, Nunukan Kabupaten dan Malinau.

Bahkan dirinya sudah mulai membenahi beberapa catatan yang diberikan oleh BPK RI, untuk dapat mewujudkan penilaian opini WTP tersebut. “Beberapa catatan dari BPK RI kita tinggal aset saja lagi,” ujarnya saat ditemui belum lama ini.

“Terutama mengenai aset yang belum ada penulusuran dan sekarang sudah kita garap termasuk aset inventaris.” timpalnya.

Disinggung mengenai aset jalan yang dimaksudkan, mantan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Bulungan ini menyebutkan, seluruh aset jalan dari tingkat desa hingga kabupaten akan didaftarkan. “Ya aset jalan yang berada di ibu kota kabupaten, kecamatan dan di desa belum kita daftar.” bebernya.

Jika sebelumnya beberapa catatan dari BPK RI sehingga membuat Kabupaten Bulungan gagal lagi meraih opini WTP tersebut. Di antaranya sebanyak 11 unit roda dua dan 45 mobil yang belum dikembalikan. Pembayaran gaji dan tunjangan yang salah mencapai 294 juta.

Sehingga di tahun-tahun mendatang, pria yang dikaruniai dua orang anak ini akan mengupayakan meraih opini WTP. “Tahun yang akan datang *Insyallah* WTP,” harapnya.

Sudjati menambahkan, terkait dengan kondisi keuangan dirinya akan berupaya untuk membenahi sehingga dapat melakukan apa yang sudah diraih oleh daerah lainnya. “Sama dengan kabupaten lain, kita raih WTP.” pesannya.

Disinggung mengenai kondisi sekolah yang bersengketa sehingga sulit meraih yang diinginkan, ia menyebutkan salah satunya status sekolah yang bersengketa sudah selesai. “Kalau sekolah SDN 019 sudah selesai. Sudah selesai tetapi uangnya *ndak* ada untuk membangun, nunggu lagi ada anggaran.” tuntasnya